



**PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI ANTARA
INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SKRIPSI

SULISTYANING KARINA TARADHANTI

2210611137

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1

HUKUM 2026



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA YANG DILINDUNGI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

SULISTYANING KARINA TARADHANTI

2210611137

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program

Studi S1 – Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta, 15 Juli 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN. 0031129401

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,

S.H., M.H., M.Tr.Adm. Kes.

NIP. 199304282022031009



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh

Nama : Sulistyaning Karina Taradhanti
NIM : 2210611129
Program Studi : S1 Hukum
Perbandingan Sanksi Hukum Tindak Pidana

Judul : Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Antara
Indonesia Dan Australia

Telah berhasil diseminarkan pada seminar komprehensif dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Penguji 1

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes



Dekan
Dr. Sunerman, S.H., LLM

Koordinator Program Studi Program Sarjana

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sulistyaning Karina Taradhanti
N.I.M : 2210611137
Tanggal : 19 Juli 2026
Tanda Tangan : 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyaning Karina Taradhanti

NIM/NPM : 2210611137

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Perbandingan Sanksi Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Antara
Indonesia Dan Australia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalti Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber- ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,
Yang menyatakan,

Sulistyaning Karina Taradhanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran dan dengan baik menyelesaikan skripsi berjudul “PERBANDINGAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang sangat berkontribusi dalam penyusunan skripsi Penulis.

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.K.N. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan & Umum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni & Kerja Sama dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan seluruh ilmu serta pelayanan terbaik selama masa perkuliahan jenjang Strata 1 di sini.

8. Papah, Mamah, Mbak Kiki, dan Mas Pippo yang penulis sayangi dan yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
9. Lala, Yanti, Denise, Farraz, dan Pipit selaku teman penulis yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini, serta teman-teman bimbingan Pak Handar yang saling support satu sama lain.

Penulis menyadari akan adanya tidak sempurna dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima adanya kritik dan saran yang sekiranya dapat membantu penulis untuk memperbaiki penulisan atau penelitian di masa depan. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membantu setiap individu yang membacanya.

ABSTRAK

Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati global, sehingga memerlukan pengaturan sanksi pidana yang tegas dan efektif di tingkat nasional. Skripsi ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dan Australia, serta membandingkan disparitas sanksi pidana berdasarkan regulasi masing-masing negara. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative law*), penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah terkait di Indonesia dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2024, dibandingkan dengan Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) beserta amendments di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur delik perdagangan satwa melalui Pasal 40A UU Konservasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp5 miliar, yang sering kali bersifat umum dan kurang spesifik terhadap spesies tertentu, sementara Australia menerapkan sanksi yang lebih berlapis melalui EPBC Act dengan pidana penjara maksimal hingga 10 tahun, denda mencapai 1000 *penalties unit*, termasuk penerapan *strict liability* yang ketat. Perbandingan substantif mengungkap bahwa Australia unggul dalam sanksi finansial progresif dan pertanggungjawaban korporasi, sedangkan Indonesia masih memerlukan reformasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna mendukung implementasi CITES. Kesimpulan penelitian merekomendasikan harmonisasi sanksi pidana Indonesia dengan standar Australia melalui revisi undang-undang dan penguatan koordinasi lintas lembaga.

Kata Kunci: Perbandingan satwa dilindungi, sanksi pidana, hukum Indonesia, hukum Australia, perbandingan hukum, CITES

ABSTRACT

Illegal trade in protected wildlife poses a serious threat to global biodiversity, necessitating strict and effective criminal sanctions at the national level. This thesis aims to analyze the legal regulations concerning protected wildlife trade offenses in Indonesia and Australia, as well as to compare the disparities in criminal sanctions based on each country's regulations. Employing a normative juridical approach with a comparative law method, this study examines Indonesia's Law No. 5 of 1990 on Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems along with related government regulations, compared to Australia's Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) and its amendments. The research findings indicate that Indonesia regulates wildlife trade offenses under Article 40 of the Conservation Law with a maximum penalty of 15 years imprisonment and a fine of IDR 5 billion, which is often general and lacks specificity for certain species. In contrast, Australia imposes more layered sanctions through the EPBC Act, including up to 10 years imprisonment, fines reaching 1000 *penalties unit*, along with strict liability enforcement. Substantive comparison reveals Australia's superiority in progressive financial penalties and corporate accountability, while Indonesia requires reforms to enhance law enforcement effectiveness in support of CITES implementation. The study concludes by recommending harmonization of Indonesian criminal sanctions with Australian standards through legislative revisions and strengthened inter-agency coordination.

Keywords: Protected wildlife trade, criminal sanctions, Indonesian law, Australian law, comparative law, CITES

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
BIODATA PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	13
B. Tinjauan Teori	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	27
A. Pengaturan Hukum Perdagangan satwa dilindungi di Indonesia	27
B. Pengaturan Hukum Terkait Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Australia	30
C. Bentuk Sanksi Pidana dan/atau Administratif di Masing-Masing Negara..	33
D. Perbandingan Bentuk Sanksi di Indonesia dan Australia	36

BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Pengaturan Hukum Terkait Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Dan Australia	38
B. Perbandingan Sanksi Terkait Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Dan Australia	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tinjauan hasil penelitian terdahulu	15
Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Hukum Perdagangan Satwa Dilindungi.....	42
Tabel 3. Perbedaan dasar hukum dan landasan normatif antara Indonesia dan Australia	46
Tabel 4. Perbedaan model pengaturan antara Indonesia dan Australia.....	47
Tabel 5. Perbedaan cakupan larangan dan objek yang dilindungi antara Indonesia dan Australia	49
Tabel 6. Perbedaan sanksi antara Indonesia dan Australia.....	54